

## Dasar Penerapan Serta Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Sari Mahwati Hasibuan  
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah Batam  
E-mail: [sarimahwati.hasibuan@gmail.com](mailto:sarimahwati.hasibuan@gmail.com)

### Abstract:

Education is a system in which there is a teaching and learning process that aims to provide an understanding of what is not yet known. In improving the quality of education in Indonesia, there is the implementation of SBM in the implementation of educational institutions, where SBM itself is everything related to management with the aim of maximizing the short and long term. SBM emerged as a form of the autonomous system implemented by the government in the field of education. Autonomy itself is a full obligation in the implementation of an activity or activity, which also requires participatory decision making by the parties involved in the implementation. In implementing SBM, it is also necessary to understand the principles so that work can be carried out optimally.

**Keywords:** Basic Apply; Principles of School-Based Management (SBM)

### Abstrak

Pendidikan merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat proses belajar mengajar yang bertujuan untuk memberi pemahaman tentang apa yang belum diketahui. Dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, terdapat penerapan MBS pelaksanaan lembaga pendidikan, dimana MBS sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dengan tujuan memaksimalkan pencapaian tujuan jangka pendek dan panjang. MBS muncul sebagai bentuk dari sistem otonomi yang diterapkan pemerintah dalam bidang pendidikan. Otonomi sendiri merupakan kewenangan penuh dalam pelaksanaan lembaga ataupun kegiatan, yang juga memerlukan pengambilan keputusan partisipatif oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan tersebut. Dalam pelaksanaan MBS juga diperlukan pemahaman akan prinsip agar kerjanya terlaksana dengan maksimal.

**Kata Kunci :** Dasar Penerapan; Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

### Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk melahirkan generasi penerus yang mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, seta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Memperhatikan begitu pentingnya tujuan pendidikan, maka tidak salah jika pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah, bahkan menjadi salah satu unsur Millennium Development Goals (MDGs).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 11.

Pendidikan adalah suatu sistem yang sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat intelegensi masyarakat dalam segala macam aspek. Karena dengan pendidikan manusia yang ada dalam interaksi sosial dapat bersaing dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai cita-cita yang diinginkan. Menurut ketetapan MPRS No. II tahun 1960, tujuan pendidikan ialah mencetak generasi kearah mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai dengan pancasila sehingga dapat bertanggung jawab sebagai masyarakat yang adil serta mempunyai daya spiritual yang tinggi.<sup>2</sup>

Dewasa ini banyak upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa (Nation Character Building) untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dalam konteks bangsa Indonesia, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh.<sup>3</sup>

Dari sini dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana dalam penciptaan generasi-generasi yang berkualitas dalam berbagai aspek sebagaimana ditetapkan dalam peraturan undang-undang pendidikan yang menjadi suatu hal penting untuk diutamakan dan difokuskan. Dan dalam dunia pendidikan perlu untuk terus mengalami peningkatan mutu, baik dari segi sekolah itu sendiri maupun para pendidik serta peserta didiknya agar dalam perjalanan pencapaian tujuan menjadi lebih maksimal.

Kekuatan yang hakiki dari reformasi bangsa dimulai dari sumber daya manusia (SDM) yang memiliki visi, dan kepribadian yang mau mengedepankan kepentingan orang banyak dalam berbagai aspek kehidupan. Sekarang ini banyak bangsa yang mengabaikan peranan SDM sehingga mau saja menerima keadaan yang telah merendahkan harkat dan martabat bangsa yang nampak dari kemiskinan, kebodohan dan tidak tegaknya hukum. Agar suatu masyarakat atau bangsa dapat melakukan perubahan atau reformasi diperlukan peningkatan kualitas SDM. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pendidikan, dan pelatihan dalam arti yang luas. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan haruslah mencakup semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan seperti yang terdapat dalam

---

<sup>2</sup> Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1973), hal. 78.

<sup>3</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung: PT. Remaja Rosdaarya, 2005), hal. 31.

Sistem Pendidikan suatu bangsa. Banyak faktor yang ikut berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, namun salah satu yang diduga besar pengaruhnya ialah faktor manajemen pendidikan, terutama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).<sup>4</sup>

Merujuk penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan sebuah lembaga pendidikan dibutuhkan sistem manajemen yang berbasis sekolah, yang didalamnya memiliki berbagai faktor yang dapat menunjang terlaksananya pendidikan dengan lebih baik. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin membahas mengenai dasar pengetahuan tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang di dalamnya terdapat beberapa poin yang dirangkum dalam sebuah konsep yaitu mengenai pengertian, dasar dan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Adapun yang menjadi penjelasan dalam pembahasan kali ini mencakup dua poin yaitu tentang pengertian dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) serta yang menjadi bagian dari konsep dari MBS itu sendiri. Sehingga dengan begitu akan memperoleh hasil tujuan yang jelas dari pembahasan ini yaitu memahami seperti apa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan mengetahui apa saja yang menjadi bagian dari konsep MBS.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini dikategorikan penelitian perpustakaan (*library research*) karena data yang diteliti bersumber, buku dan hasil. Data yang digunakan terbagi dua, data primer dan sekunder. Data primer. Data sekunder sebagai pendukung data primer, diambil dari buku dan hasil penelitian relevan yang berhubungan dengan fokus kajian. Analisis data menggunakan metode analisis teks.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

Manajemen menurut Mulyasa (2003) merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan proses untuk berbagai bentuk tujuan baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Adanya manajemen dalam suatu organisasi ialah untuk melaksanakan kegiatan agar dapat mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien. Sementara pengertian sekolah dari segi bahasa berasal dari bahasa latin yaitu *skhhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah juga diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan anak-anak di waktu luang mereka yang kegiatan utamanya mereka yaitu bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja.

---

<sup>4</sup> Sri Nurabdiah Pratiwi, *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah*, Jurnal Edutech, Vol. 2 No. 1- 2016, hal 86.

Jika kedua kata tersebut dipadukan maka akan menjadi manajemen sekolah yang pada haikatnya memiliki pengertian yang sama dengan manajemen pendidikan. Namun, manajemen pendidikan memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan dengan manajemen sekolah. Menurut Rohiat (2009), manajemen sekolah adalah suatu proses pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan beberapa pengertian mengenai manajemen, yang merupakan suatu proses pengelolaan, pengaturan suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dan juga sekolah, yang merupakan suatu wadah untuk menjalankan proses yang bertujuan untuk mengetahui apa yang sebelumnya belum diketahui sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu. Jadi untuk pengertian manajemen sekolah itu sendiri ialah suatu proses yang dilakukan untuk mengatur segala bentuk kebutuhan yang dimiliki oleh suatu sekolah agar mudah dalam mencapai tujuan.

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Berdasarkan fungsi dari manajemen tersebut penulis perlu kiranya menjelaskan beberapa pengertian tentang manajemen sekolah atau manajemen pendidikan.

Manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata yang mempunyai satu makna, yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri khas yang ada dalam pendidikan. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah sebuah alat yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Unsur manajemen dalam pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dikaitkan dengan dunia pendidikan.<sup>6</sup>

Kata manajemen pendidikan merupakan gabungan dari kata manajemen dan pendidikan. Manajemen yang berarti pengelolaan secara terstruktur mengenai suatu hal untuk memaksimalkan proses pencapaian tujuan. Pendidikan merupakan suatu lembaga yang menjalankan proses pembelajaran dimana terdapat pendidik sebagai seseorang yang

---

<sup>5</sup> Mujiburrahman, *Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik: Teori dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hal. 5-9.

<sup>6</sup> Nurokhim, *Implementasi Manajemen berbasis Sekolah di Madrasah*, Jurnal Kependidikan, Vol. 5 No. 2-2017, hal. 251.

menyampaikan segala pesan mengenai pengetahuan dan peserta didik sebagai penerima pesan. Jadi, manajemen pendidikan merupakan suatu pengaturan atau pengelolaan mengenai jalannya proses pendidikan agar setiap tahapan dalam pencapaian tujuan dapat terealisasi dengan maksimal. Yang mana manajemen yang digunakan dalam dunia pendidikan adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Odden, & Busch (Aslam, 2013) menegaskan bahwa tidak diragukan lagi, sistem MBS lebih berhasil ketika sekolah menggunakan otoritas pengambilan keputusan mereka untuk merekrut dan memilih staf yang mendukung dan setuju dengan visi sekolah. Jelas bahwa sistem MBS telah menciptakan peluang bagi administrasi sekolah untuk mencapai otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan akuntabilitas.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional, manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah sebagai model manajemen yang memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada sekolah dan menimbulkan adanya pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat anatar semua pihak sekolah meliputi kepala sekolah, para guru, wali murid sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah yang berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional.<sup>8</sup>

Manajemen Berbasis Sekolah lahir dengan beberapa istilah nama yang berbedabeda, diantaranya Tata kelola berbasis sekolah (School based Governemance), manajemen mandiri sekolah (*school self management*) dan juga dikenal dengan school site management atau manajemen yang bermarkas sekolah. Istilah-istilah tersebut mengandung definisi dengan fokus yang sedikit berbeda, namun istilah-istilah tersebut memiliki dasar yang sama yaitu sekolah menjadi memiliki hak otonomi dalam melaksanakan manajemen sekolahnya. Khususnya dalam sumber daya manusia, keuangan dan material (man, money and material) yang ada disekolah. Manajemen Berbasis Sekolah menjadi model manajemen sekolah yang memberikan otonomi yang cukup besar kepada sekolah dalam mendorong pengambilan keputusan dengan melibatkan partisipasi langsung dari seluruh warga sekolah, seperti guru, siswa, kepala sekolah, pegawai sekolah, orangtua siswa dan masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.<sup>9</sup>

Mengambil kesimpulan dari pemaparan di atas tentang pengertian manajemen berbasis sekolah ialah suatu proses pengelolaan, pengaturan dan pengontrolan yang akan dilaksanakan

---

<sup>7</sup> Yuyun Elizabeth Patras, dkk, *Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan Tantangannya*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 7 No. 2- 2019, hal. 801.

<sup>8</sup> Alif Achadah, *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Konsep Dasar Dan Implementasinya Pada Satuan Pendidikan*, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah, Vol. 4 No. 2-2019, hal. 84.

<sup>9</sup> Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 35.

selama berlangsungnya suatu lembaga kependidikan yang akan memberikan kewenangan seluas-luasnya dalam mencapai segala bentuk tujuan pendidikan secara bersama-sama. Selain itu, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) juga diterapkan untuk membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri yang meliputi kualitas sekolah, sarana prasarana, pendidik, peserta didik dan lingkungan di sekolah agar sekolah terus mengalami perkembangan dari masa ke masa.

### **Dasar Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah suatu cara untuk memajukan mutu pendidikan dengan pelimpahan kebijakan pengambilan keputusan yang seyogyanya berasal dari pemerintah pusat kepada daerah masing-masing lembaga, yang hal tersebut menjadikan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap kegiatan belajar mengajar di lembaga atau di sekolah, dan yang tak kalah penting adalah bahwa sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil keputusan dalam bidang keuangan dan kurikulum sekolah.

Penerapan MBS pada masing-masing satuan pendidikan membutuhkan pemahaman terkait hal-hal mendasar tentang bagaimana permulaan penerapan MBS secara lebih luas. Para manajer satuan pendidikan perlu memahami tentang permasalahan-permasalahan dalam desentralisasi dan penerapan MBS.<sup>10</sup> Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan dengan adanya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu memahami konsep yang menjadi pegangan dalam pelaksanaannya, yang mana dengan adanya konsep akan jauh lebih mudah menerapkannya karena konsep merupakan suatu pengetahuan dasar tentang sesuatu yang menjadi pembahasannya.

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 67.

<sup>11</sup> Ahmad Zaini Aziz, *Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*, Jurnal El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 No. 1-2015, hal 78.

Otonomi menjadi bagian dari hal yang mendasar manajemen berbasis sekolah dikarenakan MBS merupakan suatu sistem baru yang digunakan dalam pelaksanaan sekolah yang mana sebelumnya tidak menggunakan MBS ini melainkan dengan segala bentuk pengelolaan dan peraturan bergantung pada pihak pemerintahan yang diturunkan kepada pihak sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan partisipatif juga menjadi dasar pendukung penerapan MBS.

### **1. Otonomi**

Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan mereka tidak tergantung pada pihak manapun. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Tentu saja kemandirian yang dimaksud harus didukung oleh sejumlah kemampuan. Yaitu kemampuan mengambil keputusan yang terbaik, kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan memobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik dan kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif. Selain itu juga kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan adaptasi dan antisipasi, kemampuan bersinergi dan berkolaborasi dan kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Salah satu inti dari manajemen berbasis sekolah adalah adanya pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengambil keputusan dan berbagai kebijakan dalam berbagai aspek kegiatan dan program sekolah. Pemberian kewenangan yang seluas-luasnya inilah yang disebut dengan istilah otonomi sekolah. Otonomi inilah yang membedakan dengan konsep sentralisasi yang terjadi selama masa orde baru, yang kemudian bergeser ke otonomi kabupaten/kota yang pada akhirnya diharapkan menjadi otonomi sekolah yaitu pergeseran kewenangan dari pemerintah kabupaten kota ke sekolah.<sup>12</sup> Jadi intinya, dengan adanya otonomi ini diharapkan mampu membantu suatu lembaga kependidikan untuk mendapatkan keluasan dalam mengatasi segala bentuk persoalan yang mungkin terjadi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yang dengan ini akan sangat memudahkan pihak sekolah dikarenakan segala yang terjadi hanya diketahui dan akan diselesaikan oleh pihak yang terkait dalam sekolah itu saja.

---

<sup>12</sup> Arismunandar, dkk, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2015), hal. 53.

Salah satu indikator manajemen berbasis sekolah adalah adanya otonomi sekolah atau kewenangan sekolah yang diberikan seluas-luasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan pendidikan di sekolah. Kewenangan ini pada dasarnya dimiliki sekolah atas kepercayaan yang diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan tersebut ada yang sudah melekat pada tugas pokok sekolah seperti pelaksanaan ulangan harian, perawatan sarana, dan lain sebagainya maupun kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota seperti dalam pengadaan sarana dan prasarana. Sebagian kewenangan tersebut telah dilaksanakan dengan baik namun sebagian kewenangan lainnya belum dilaksanakan dengan baik. Untuk itu perlu didorong pendekatan-pendekatan strategis untuk melaksanakan kewenangan tersebut secara optimal.<sup>13</sup>

Adanya otonomi yang diberikan pemerintah yang ada pada segala bidang kehidupan, membuat sekolah juga memiliki otonomi sendiri yaitu otonomi sekolah yang dengan ini muncullah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai salah satu bentuk dari otonomi yang diberikan pemerintah kepada lembaga pendidikan yang akan sangat membantu pihak sekolah untuk mengatur sekolahnya sesuai dengan otoritas yang ada di sekolah dan disepakati secara bersama-sama. Karena inti dari MBS adalah memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada sekolah untuk mengatur dan mengelola sekolah sesuai dengan kemampuannya tanpa melibatkan pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya pada sekolah.

## **2. Pengambilan keputusan partisipatif**

Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik oleh warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orangtua siswa, tokoh masyarakat). Warga sekolah didorong untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pengambilan keputusan, maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” terhadap keputusan tersebut sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggungjawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Singkatnya makin besar tingkat partisipasi, makin besar pula rasa tanggungjawab dan makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggungjawab dan makin besar rasa tanggung jawab, makin besar pula dedikasinya. Tentu saja pelibatan

---

<sup>13</sup> Rivai Veithzal & Sylviana Murni, *Education Management Analisis Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 49.

warga sekolah dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan pengambilan keputusan sekolah.<sup>14</sup>

Pengambilan keputusan partisipatif ini ditujukan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan tanggungjawab tiap-tiap pihak yang menjadi bagian dari warga sekolah, yang ikut andil dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan suatu kegiatan dalam dunia kependidikan. Jadi, otonomi merupakan suatu sistem yang memberikan kewenangan sepenuhnya pada sebuah lembaga tertentu dalam hal pelaksanaan. Dalam pembahasan ini terkhusus pada otonomi yang diberikan kepada pihak sekolah dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menggunakan keputusan partisipatif, yang merupakan bentuk dari bagaimana suatu proses itu berjalan yaitu dengan cara diskusi secara bersama-sama.

### **Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

Teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat prinsip, yaitu Prinsip Ekuifinalitas, Prinsip Desentralisasi, Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri, dan Prinsip Inisiatif Sumber Daya Manusia.<sup>15</sup> Keempat prinsip inilah yang akan menjadi pedoman atau pegangan dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

#### **1. Prinsip Ekuifinalitas (*Principle of Equifinality*)**

Prinsip ekuifinalitas beranggapan bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi masing-masing, walaupun sekolah yang berbeda dihadapkan masalah yang sama, cara penanganannya akan berlainan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.

#### **2. Prinsip Desentralisasi (*Principle of Decentralization*)**

Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah.<sup>16</sup>

Dalam dunia pendidikan, dengan adanya sistem desentralisasi ini akan memudahkan pihak sekolah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang hanya diketahui

---

<sup>14</sup> Dirjo Ardiansyah, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Direktur Pembinaan SMA, 2018), hal. 9-10.

<sup>15</sup> Asbin Pasaribu, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah*, Jurnal Educath, Vol. 3 No. 1-2017, hal. 17

<sup>16</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 30.

pihak sekolah, karena merekalah yang akan berdiskusi dan mencari jalan keluarnya sendiri berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip ini merupakan efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang yang luas kepala sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah menurut strategi-strategi yang unik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

### **3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri**

Prinsip ini memberikan kewenangan sekolah untuk mengelola secara mandiri dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara kolaboratif, dengan demikian sekolah memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran, strategi manajemen, distribusi sumber daya manusia dan lainnya, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan berdasarkan kondisi masing-masing.

### **4. Prinsip Inisiatif Manusia (*Principle of Human Initiative*)**

Prinsip ini adalah prinsip yang mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Karena itu potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan. Lembaga pendidikan harus menggunakan prinsip ini, yang mana memiliki konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di sekolah sebagai asset yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Prinsip Ekuifinalitas, Desentralisasi, Pengelolaan Mandiri dan prinsip inisiatif manusia yang disebutkan diatas perlu untuk dipahami dalam pengimplementasian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dikarenakan dengan memahami ini akan memudahkan dalam menjalankannya. Keempat prinsip ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga mengharuskan juga untuk mengikutinya dengan baik sehingga menghadirkan keselarasan dan ketercapaian tujuan dari adanya MBS ini sendiri.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan banyaknya penjelasan yang telah dipaparkan penulis di atas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diambil kesimpulannya melalui beberapa poin penting. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan proses untuk berbagai bentuk tujuan baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang dilaksanakan dengan melakukan diskusi oleh segala pihak yang terkait dengan sekolah itu dengan prosedur yang ada secara sistematis. Dengan kata lain, MBS berjalan dengan kekuasaan penuh sekolah dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terdapat hal-hal yang perlu diketahui oleh pelaksananya agar dalam melaksanakannya berjalan dengan maksimal, seperti pengetahuan dasar mengenai konsep yang biasa digunakan sebagai pegangan agar pelaksanaannya menjadi lebih teratur dan diharapkan memberi hasil yang maksimal. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, dan mereka tidak tergantung pada pihak manapun. Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis oleh warga sekolah. Prinsip MBS antara lain Prinsip Ekuifinalitas, Prinsip Desentralisasi, Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri, dan Prinsip Inisiatif Sumber Daya Manusia.

### **Daftar Pustaka**

- Achadah, Alif, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): Konsep Dasar Dan Implementasinya Pada Satuan Pendidikan, *Tarbiyatuna Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol. 4 No. 2-2019.
- Ardiansyah, Dirjo. 2018. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Direktur Pembinaan SMA.
- Arismunandar, dkk, 2015. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Aziz, Ahmad Zaini, *Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*, *Jurnal El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 1-2015.
- Danim, Sudarwan. 2007. *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Fattah, N. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hadiyanto, 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Indrakusuma, Amir Daien. 1973. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usana Offset Printing.
- Mujiburrahman, 2018. *Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik: Teori dan Implementasinya*, Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Mulyasa, E. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Menyukseskan MBS dan KBK*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurokhim, *Implementasi Manajemen berbasis Sekolah di Madrasah*, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 5 No. 2-2017.
- Pasaribu, Asbin, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah*, *Jurnal Educath*, Vol. 3 No. 1-2017.

- Patras, Yuyun Elizabeth, dkk, Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan Tantangannya, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 7 No. 2- 2019.
- Pratiwi, Sri Nurabdiah, Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah, Jurnal Edutech, Vol. 2 No. 1- 2016.
- Veithzal, Rivai. & Sylviana Murni, 2010. Education Management Analisis Teori dan Praktik, Jakarta: Rajawali Press